

KEKUASAAN KONSTITUSIONAL

(Telaah atas Pemikiran Politik Nocolo Machiavelli)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat Islam
Dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat**

Oleh:

AHMAD RIFA'I
NIM. 98 51 2626

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
Shofiyullah, Mz, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Rifa'i
Lamp : 1 (satu lembar)

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr . wb

Setelah membaca, meneliti serta mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

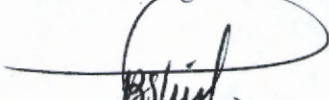
Nama : Ahmad Rifa'i
NIM : 98512626
Jurusan : Aqidah Filsafat
Judul skripsi : ***Kekuasaan Konstitusional (Telaah atas Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli)***

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah untuk memperoleh gelar strata satu Filsafat Islam dalam ilmu Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan kami semoga dalam waktu singkat, skripsi ini dapat diterima Fakultas untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr .wb
Yogyakarta, 16 Juli 2004

Pembimbing I



Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP. 150 235 497

Pembimbing II



Shofiyullah, Mz, M.Ag
NIP.150 299 964



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telepn/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/991/2004

Skripsi dengan judul : *Kekuasaan Konstitusional (Telaah atas Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli)*


Diajukan oleh :

1. Nama : Ahmad Rifa'i
2. NIM : 98512626
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF

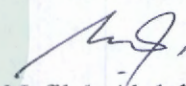
Telah dimunaqosyahkan pada hari : Senin, tanggal : 2 Agustus 2004 dengan nilai : 75 / B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

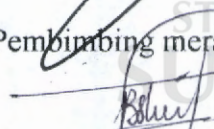
Ketua Sidang


Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150 215 586

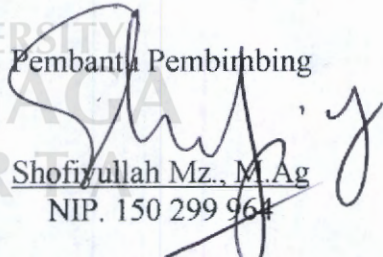
Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
NIP. 150 228 024

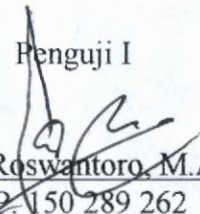
Pembimbing merangkap Penguji


Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP. 150 235 497

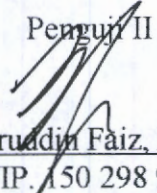
Pembantu Pembimbing


Shofiyullah Mz., M.Ag
NIP. 150 299 964

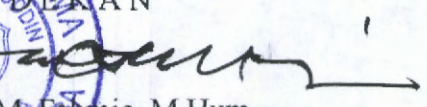
Penguji I


Alim Roswanto, M.Ag
NIP. 150 289 262

Penguji II


Fahrudin Faiz, M.Ag
NIP. 150 298 986

Yogyakarta, 2 Agustus 2004
K A N


Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP. 150 088 748



PERSEMBAHAN

Kepada Ayah dan Ibuku Tercinta
Dan kepada teman-teman yang selalu mensupport, demi terselesainya
skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

.....semakin orang tidak mengandalkan nasib mujur, maka ia
akan semakin kuat¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Niccolo Machiavelli, *Il Principe : Sang Penguasa*, terj. C. Woekirsari (Jakarta, Gramedia, 2002), hlm. 22

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Dengan kekuatan dan petunjuk dari Allah SWT. saya bersyukur skripsi ini dapat terselesaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi setiap yang membacanya. Mudah-mudahan bagi para peminat pemikiran filsafat politik, khususnya pemikiran filsafat politik Niccolo Machiavelli dapat melanjutkan penelitian yang telah kami lakukan sehingga dapat menambah kesempurnaan dari penelitian yang telah dilakukan dan dideskripsikan dalam skripsi ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

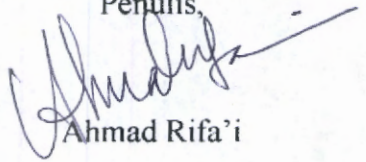
1. Bapak Dekan dan Pembantunya,
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Aqidah Filsafat,
3. Bapak Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag dan Bapak Shofiyullah, Mz, M.Ag selaku pembimbing kami,
4. Bapak Drs. H. M. Achmadi Anwar, MM selaku penasehat akademik kami,
5. Pada seluruh keluarga, ayah, ibu dan saudara yang telah memberikan dorongan untuk belajar,
6. Semua pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan segala rahmat-Nya atas kebaikan dan amal mereka. Amin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Yogyakarta, 17 Juli 2004

Penulis,



Ahmad Rifa'i



ABSTRAKSI

Mencermati hingar bingar urgensi pemilihan langsung presiden (dalam konteks Indonesia) kita dapat menebak bahwa selama ini kerap terjadi penyimpangan pada kekuasaan. Kekuasaan rezim orba yang dianggap menindas dan memonopoli dalam penafsiran pandangan hidup, semakin mengerdilkan dan memasung peran kreatif masyarakat untuk berpartisipasi memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Definisi istilah kekuasaan sebagai tarik-menarik dan saling mempengaruhi antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah (agar keinginannya dapat dilaksanakan oleh pihak yang dikuasai), merupakan istilah umum dalam dunia politik. Kekuasaan menjadi problem sentral dalam relasi apapun, baik konteks hubungan antar individu/kelompok maupun dalam konteks interaksi penguasa dengan rakyat. Dengan kekuasaan, seorang penguasa dalam "sistem nasional" (negara) dapat mendesak agenda-agenda kenegaraan -baik sesuai maupun tidak- dengan aspirasi masyarakat untuk tujuan yang -katanya- demi kemajuan bangsa.

Kekuasaan yang dimaksud disini, adalah kekuasaan dalam konteks hubungan antara penguasa (beserta perangkat-perangkatnya maupun regulasi- sebagai pemegang kekuasaan) dan rakyat (sebagai obyek kekuasaan). Dalam skala mikro kekuasaan mempunyai makna relasi sosial antar individu/kelompok (Johan Galtung), dalam skala makro masifitas relasi ini menjadi wadah negara yang menurut Max Weber memiliki kekuatan dan kekuasaan politik yang besar dalam memonopoli penggunaan kekerasan. Konsekuensi ini timbul akibat dari kesepakatan penyerahan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama.

Dalam sistem pemerintahan apapun saat ini baik monarki, aristokrasi maupun demokrasi terdapat kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan baik tersembunyi maupun terang terangan. Alat-alat kekuasaan, hukum ataupun militer merupakan ponopang bagi kelangsungan kekuasaan suatu rezim. Mencermati pola-pola kekuasaan para pemimpin bangsa, terdapat degradasi pemaknaan tentang kekuasaan. Pandangan kekuasaan sebagai amanat rakyat berubah menjadi sarana pemenuhan ambisi pribadi dan kelompok pemegang kekuasaan.

Praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan tidak berhenti pada dataran kekuasaan yang telah mapan. Tetapi juga pada situasi perolehan kekuasaan tersebut, kericuhan dalam pemilihan kepala desa atau kepala daerah misalnya, kadang memicu konflik berkepanjangan. Ini disebabkan aksi-aksi politik yang tidak mengindahkan kaidah berpolitik secara sehat dan wajar. Ini menunjukkan dalam proses politik di Indonesia belum menuju pada tataran pencerahan politik.

Disinilah sesungguhnya konstitusi memegang peranan penting dalam mengarahkan jalannya proses politik yang benar dan demokratis. Dalam sejarahnya konstitusi mengalami pasangan surut, diawali dengan pandangan konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan awal mengenai pentingnya pembatasan dan pengawasan kekuasaan penguasa. Disamping itu konstitusionalisme mencerminkan

interaksi dan relasi kekuatan politik yang ada di masyarakat. Stabilitas kekuatan politik bergantung pada apa ia mendasarkan diri serta orientasi apa yang ditawarkan dan akhirnya pilihan rakyat merupakan “vonis” bagi berdirinya suatu kekuasaan politik. Undang-Undang Dasar (Konstitusi) tertulis merupakan perkembangan dari konstitusionalisme. Konstitusi memuat dasar-dasar pembentukan kelembagaan negara dan tujuan apa yang hendak diraih, karena konstitusi adalah manifestasi kehendak rakyat, maka partisipasi rakyat dalam setiap proses politik merupakan sesuatu yang dihargai dan dilindungi. Konstitusi memegang peranan vital dalam menjembatani kepentingan antara penguasa dan rakyat. Dan penguasa yang baik adalah yang taat pada konstitusi dan mampu mengapresiasi kehendak rakyatnya.

Akhirnya kekuasaan absah bukan saja dipilih oleh mayoritas masyarakat, yang lebih penting apakah kekuasaan tersebut diraih dengan cara-cara konstitusional atau cara-cara kecurangan (atau jangan-jangan kecurangan yang “dikonstitusionalkan” ?)

Wallahu'alam --



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstraksi.....	viii
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KEKUASAAN, KONSTITUSI DAN KEKUASAN KONSTITUSIONAL

A. Kekuasaan	19
1. Pengertian Kekuasaan	19
2. Sumber Kekuasaan	22

3. Jenis-jenis Kekuasaan	25
B. Konstitusi	27
1. Pengertian Konstitusi	27
2. Latar Belakang Munculnya Konstitusi	30
3. Fungsi Konstitusi	31
C. Kekuasaan Konstitusional	33
1. Konstitusionalisme	33
2. Pengertian Kekuasaan Konstitusional	34
3. Tujuan Kekuasaan Konstitusional	34

**BAB III
BIOGRAFI NICCOLO MACHIAVELLI**

A. Situasi Sosial Politik Italia Masa Machiavelli.....	35
B. Sumber Inspirasi Pemikiran Politik Machiavelli.....	38
C. Kiprah Machiavelli Dalam Dunia Politik.....	41
D. Karya-karya Machiavelli.....	44

**BAB IV
NEGARA DAN KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN MACHIAVELLI**

A. Negara.....	47
1. Bentuk-Bentuk Negara.....	48
2. Negara Sebagai Sumber Kekuasaan.....	51
3. Tujuan Negara.....	52
B. Kekuasaan	54
1. Persoalan Kekuasaan.....	54

2. Cara Memperoleh Kekuasaan.....	57
2.1. Kekuasaan Konstitusional.....	57
2.2. Prinsip-prinsip Kekuasaan Konstitusional	61
3. Cara Mempertahankan dan Memperbesar.....	63
C. Konstitusi, Hukum dan Militer.....	66
D. Menakar Dukungan Rakyat bagi Stabilitas Kekuasaan Politik.....	70
E. Relevansi Pemikiran Machiavelli dalam Konteks Indonesia.....	73

**BAB V
PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA
TENTANG PENULIS**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan dalam berbagai sudut pandang merupakan persoalan ambigu; mempesonakan, sekaligus mengerikan. Tetapi juga sebagai sebuah konsep yang paling dasar dalam ilmu politik. Dikatakan dasar, karena mendasari relasi-relasi sosial. Bahkan, ada yang menganggap bahwa ilmu politik tidak lain adalah ilmu tentang kekuasaan.¹ Kekuasaan itu juga merupakan satu istilah yang sangat abstrak, sama abstraknya dengan istilah kebebasan dan keadilan. Secara umum mungkin kita bisa mengatakan bahwa kekuasaan adalah satu otoritas kekuatan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dengannya ia mampu mengontrol tindakan-tindakan orang lain, namun secara khusus, kekuasaan akan memiliki makna yang berbeda-beda. Masing-masing tergantung dari perspektif mana melihatnya; dan dalam lingkungan sejarah bagaimana ia dimaknai.

Pandangan tentang kekuasaan dalam sejarah Barat—khususnya pada Abad Pertengahan (*Middle Age Century*)—cenderung merupakan wacana yang cukup mengerikan. Sebab kekuasaan akan selalu berkonotasi dengan kekuasaan Gereja. Segala bentuk kekuasaan politik dan pemikiran ilmiah yang bertentangan atau

¹ Dalam bukunya yang berjudul *The University Teaching of Social Science: Political Science*, William Robson salah seorang pakar politik yang mengembangkan pandangan tentang kekuasaan menjelaskan bahwa ilmu politik tidak lain adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Oleh karena itu, ilmu politik mempelajari hal ikhwal yang berkaitan dengan masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil kekuasaan. Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 5.

bertolak belakang dengan kekuasaan gereja pada saat itu akan ditumpas dan dimusnahkan.²

Dominasi Gereja dalam menafsirkan pandangan hidup dan kehidupan masyarakat semakin menjadikan orientasi kehidupan sosial politik menjadi kacau dan absolut. Legitimasi religius terhadap kekuasaan dalam masyarakat menempatkan seorang penguasa lepas dari penilaian moral.³ Dengan perlengkapan *magis-religius* itu, penguasa tidak dilihat sebagai subyek yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, melainkan hanya sebagai sebuah wadah yang digerakkan oleh kekuatan ilahi.⁴

Dominasi kekuasaan keagamaan yang sangat hegemonik pada abad pertengahan tersebut, dalam proses sejarah selanjutnya memunculkan gerakan yang dinamakan Renaisans.⁵ Gerakan Renaisans pada awal pertumbuhannya terjadi di Italia⁶ khususnya di kota-kota perdagangan seperti Florence dan Milan. Renaisans Italia ditandai oleh berbagai perubahan besar dalam gagasan, mentalitas, agama dan

² Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta:Gramedia, 2001), hlm. 112.

³ Maksudnya, dengan alasan hak-hak ketuhanan yang melekat pada diri seorang pemuka agama atau raja, maka ia secara bebas melakukan apa yang dikehendakinya, walaupun perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan kaidah umum yang berlaku. Lihat M. Sastraprateja dan Frans Parera, "kata pengantar Suatu Alternatif Kaidah Etika Politik" dalam Niccolo Machiavelli, *Il Principe*, terj.C. Woekirsari (Jakarta:Gramedia, 2002), hlm. viii.

⁴ *Ibid.*

⁵ Secara etimologis istilah Renaisans berasal dari bahasa Prancis yang berasal dari kata *Re:* kembali dan *Naitre:* lahir, berarti 'kelahiran kembali'. Dalam konteks sejarah Barat, istilah itu mengacu pada terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno dalam berbagai aspeknya. Manusia Renaisans begitu bersemangat mempelajari karya-karya 'pemikir agung' Yunani kuno seperti Plato, Plotinus dan Aristoteles. Lihat Ahmad Suhelmi, *op. cit.* hlm. 109-110.

⁶ Italia pada abad XIV merupakan bangsa yang paling penting pada awal penyebaran cita-cita Renaisans sebagai suatu gerakan intelektual dengan semangat humanistis. Lihat M. Sastra Prateja dan Frans Parera, *op. cit.*, hlm. xi.

perkembangan ilmu pengetahuan.⁷ Sebagai titik balik pemikiran dan antitesa kekuasaan abad tengah, Renaisans Italia jika ditinjau dalam perspektif sejarah merupakan masa di mana manusia menemukan kembali dunia dan kemampuan-kemampuan kreatif dirinya dan masa yang membentuk suatu peradaban baru dengan alam sebagai basisnya sedangkan kemanusiaan sebagai sumber, pusat dan tujuan peradaban.⁸

Renaisans juga merupakan bagian dari suatu proses transformasi historis yang lebih besar. Suatu unsur utama Renaisans yang bisa disebut revolusioner adalah keyakinan bahwa agama tidak memberikan cara pemecahan mendasar terhadap masalah-masalah kehidupan manusia. Humanisme sekuler Renaisans bertitik tolak dari keyakinan itu. Berdasarkan keyakinan skeptisme akut terhadap agama, humanisme sekuler—dilengkapi dengan tradisi intelektual Yunani dan Romawi—merupakan suatu teori peradaban baru.

Humanisme sekuler melawan habis-habisan tradisi teosentris peradaban lama, sekaligus pada saat yang sama mengembangkan suatu peradaban yang terpusat dan didasarkan pada manusia. Tidak lagi teosentris, berdasarkan Tuhan. Manusia menjadi sangat diagungkan. Gagasan tradisional mengenai keilahian ditransfer sebagai hak manusia, pengagungan manusia dan kekuasaannya. Kemudian manusia bergerak menjadi pusat menggantikan Tuhan. Manusia menjadi dirinya sendiri, bebas dari intervensi Tuhan dan menjadi makhluk kreatif.⁹

⁷ Ahmad Suhelmi, *op. cit.*, hlm. 114.

⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

Ide-ide tersebut dalam proses transformasinya mengalami hambatan karena harus berhadapan dengan kekuasaan keagamaan yang masih kokoh berdiri. Dialektika ide-ide humanisme sekuler dengan kekuasaan keagamaan pada akhirnya melahirkan situasi “anarki” politik dan moral. Dalam suasana ini muncul dua bentuk kekuatan kekuasaan: *Pertama*, para raja atau penguasa yang beragama Katolik serta mempunyai peranan besar dalam stabilitas bidang politik. *Kedua*, para Paus yang mengklaim dirinya berwenang di bidang kerohanian sekaligus kekuasaan politik kenegaraan.

Akumulasi kedua bentuk kekuasaan tersebut dapat disaksikan pada pertarungan para penguasa yang menuntut kekuasaan politik otonom dan dipisahkan dari kekuasaan rohani kepausan. Di pihak lain, para Paus berusaha agar otoritas mereka mencakup baik kekuasaan politik maupun kekuasaan moral atau rohani.¹⁰

Pada situasi transisi dan transformasi inilah, dalam wilayah pemikiran politik, Machiavelli (1469-1527 M.) membuka jalan bagi pemikiran kekuasaan yang sekuler. Baginya kekuasaan harus terlepas dari relasi-relasi agama dan bentuk-bentuk kekuasaan moral. Ia menyangkal asumsi bahwa kekuasaan adalah alat atau instrumen belaka untuk mempertahankan nilai-nilai moralitas, etika atau agama. Baginya segala kebijakan, agama, moralitas justru harus dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan. Bukan sebaliknya. Jadi kekuasaan harus diperoleh, digunakan dan dipertahankan demi kekuasaan itu sendiri, meskipun dengan jalan menghalalkan berbagai cara. Menurut Machiavelli kekuasaan adalah *raison d’etre* negara. Negara juga merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya

¹⁰ M. Sastrapateja dan Frans Parera, *op. cit.*, hlm. xvii.

mencakup semua (*all embracing*) dan mutlak. Bertolak dari pandangan-pandangan Machiavelli tersebut, beberapa sarjana berpendapat bahwa Machiavelli memiliki obsesi terhadap negara kekuasaan (*maachtstaat*) di mana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa bukan pada rakyat dan prinsip-prinsip hukum¹¹. Sehingga tidak heran jika nama Machiavelli sejak hampir 500 tahun dikenal oleh sebagian besar orang sebagai simbol sebuah pengertian tentang pemakaian kekuasaan yang membenarkan pemerintahan penguasa dengan tangan besi dan menolak pertimbangan moral dalam berpolitik. Oleh karena itu, “Machiavellisme” merupakan kata lain bagi sinisme kekuasaan yang membenarkan dusta, penipuan, dan pembunuhan, asal saja mendukung stabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, Machiavelli dikutuk oleh para kaum moralis.

Gagasan-gagasan kekuasaan Machiavelli patut dikaji setidaknya karena dua hal: *pertama*, gagasannya telah menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi banyak penguasa sejak awal gagasan itu dipopulerkan sampai abad XX. *Kedua*, dari perspektif sejarah pemikiran politik, gagasannya merupakan “pemutusan” hubungan total masa kini dengan masa lalu, suatu ciri penting abad Renaisans.¹² Berbeda dengan para pemikir abad pertengahan seperti Santo Agustinus (354-430) dan Thomas Aquinas (1225-1274) yang mengaitkan kekuasaan dan negara dengan agama, Tuhan dan moralitas,¹³ Machiavelli justru berpendapat bahwa kekuasaan

¹¹ Ahmad Suhelmi, *op. cit.*, hlm 133.

¹² *Ibid.*, hlm. 132.

¹³ Santo Agustinus menolak negara dunia karena menurutnya dunia dipenuhi dosa dan ketidakjujuran. Ia lebih menyerukan negara Tuhan yang di dalamnya cinta itu hanya cinta kepada Tuhan. Menurut Agustinus dengan negara Tuhan, penguasa tidak lagi menuruti apa yang diminta darah dan dagingnya, tetapi menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Sementara St. Thomas Aquinas yang disebut sebagai pujangga Gereja yang gagasannya banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, negara yang

hendaknya dipisahkan dari semua itu. Tidak ada kaitan atau relevansi antara kekuasaan dengan teologi Kritis, kecuali sejauh agama atau moral itu memiliki nilai utilitarianisme bagi kekuasaan dan negara.

Seperti Voltaire dan tokoh-tokoh Renaisans lainnya, secara intelektual, pemikiran Machiavelli juga merupakan refleksi kritis atas kehidupan politik kenegaraan abad pertengahan—khususnya Italia. Sehingga pemikiran Machiavelli menuntut para pengkajinya untuk membedakan antara mana yang merupakan respon Machiavelli atas persoalan-persoalan lokal-partikular yang melingkunginya yang bersifat tentative? Dan mana yang menjadi konsep yang diidcalkannya untuk sebuah sistem kekuasaan negara? Dengan pemetaan demikian, penelitian ini bermaksud mengungkap salah satu pemikiran cerdas Machiavelli tentang kekuasaan konstitusional.

Persoalan kekuasaan sendiri oleh Machiavelli tidak diuraikan secara sistematis. Ia tidak membuat definisi tentang kekuasaan. Ia hanya membuat anatomi kekuasaan. Menurut Machiavelli, dengan studi kasus keadaan Italia, demi ketertiban dan kesatuan negara (pemerintahan), harus ada seorang penguasa yang berobsesi memperbesar dan memusatkan kekuasaan disatu tangan. Dengan kekuasaan disatu tangan penguasa, negara dapat dikendalikan.¹⁴ Demi ketertiban dan kebesaran suatu pemerintahan, kekuasaan yang mutlak/absolut diperlukan. Dengan mengentalkan kekuasaan disatu tangan, bagi Machiavelli kekacauan Italia termasuk juga seumumnya kekacauan suatu negara, dapat diatasi.

terbaik baginya adalah negara yang berbentuk monarki, sebab dapat memelihara perdamaian yang sebaik-baiknya oleh kesatuan pikiran dari pemerintahannya. Lihat Ali Mudhofir, *Kamus Filsuf Barat* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 59-61.

¹⁴ ST. Sularto, *Penguasa Arsitek Masyarakat* (Jakarta:Gramedia, 2003), hlm. 21.

Kerasnya realitas kekuasaan bertolak dari rangkaian aksi para aktor politik. Kepentingan paling utama dibalik interaksi politik adalah kepentingan untuk memperbesar kekuasaan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam praktik pelaksanaan kekuasaan masa silam (terutama sejarah kekaisaran Romawi) terjadi praktek pengulang-ulangan pola kekuasaan seperti yang disaksikan Machiavelli pada masanya.¹⁵ Karena itu pola kekuasaan masa silam dan kontemporer, akan diulang dan diterapkan dengan cara yang hampir sama dimasa-masa yang akan datang, karena memang demikianlah realitas politik.¹⁶

Karena itu, pandangan kekuasaan teosentris (di abad pertengahan) yang menghilangkan apresiasi hak-hak politik rakyat serta memusatkan aktor kekuasaan pada golongan tertentu, dapat terulang kembali dimasa sekarang. Atau dengan pola berbeda, penguasa yang berobsesi memperluas dan memperbesar kekuasaan akan cenderung menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang.¹⁷ Dalam situasi hegemonik, tidak ada harapan bagi rakyat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya kekuasaan dan mengembangkan kreasinya secara bebas. Dalam kondisi ini pula, penguasa tidak akan efektif untuk menjalankan program-program pemerintahan.

¹⁵ Salah satu asumsi yang mendasari pendekatan Machiavelli untuk membangun filsafat politikny adalah *constancy* (tidak berubahnya) watak manusia-manusia sepanjang masa digerakkan oleh hasrat (*passions*) dan relasinya selalu sama. Perubahan historis bukanlah perubahan evolusioner tetapi pengulangan abadi dari situasi dan kejadian masa lalu. Pandangan akan pengulangan sejarah in memungkinkan Machiavelli berpaling pada sejarah untuk menemukan hukum umum dan aksioma-aksioma politik. Lihat Henry J.Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, terj.Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 253.

¹⁶ M. Sastraprateja dan Frans Parera, *op. cit.*, hlm. xxvii.

¹⁷ Contoh kongkrit di abad modern yang menjalankan pola kekuasaan ini adalah Hitler, Jerman (1933) dan Mussolini, Italia (1922). Kedua penguasa tersebut menerapkan model kekuasaan dengan memanfaatkan kekuatan dan dukungan penuh militer serta mengentalkan kekuasaan pada dirinya (Fasis). Karena itu kekuasaan dijalankan secara absolut/mutlak, tidak ada kontrol dan pengawasan yang menjamah praktek kekuasaan dari kedua penguasa tersebut. Lihat Ahmad Suhelmi, hlm. *op. cit.*, hlm 334.

Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan kerugian besar, karena akan sulit untuk melahirkan generasi yang mampu menjalankan roda kekuasaan dengan benar dan mendapat dukungan dari rakyatnya. Menurut, Machiavelli, apabila kekuasaan dapat distabilkan, tugas penguasa berikutnya adalah menciptakan iklim kehidupan kondusif yang menghargai aspirasi dan hak-hak politik rakyatnya. Karena penguasa yang terus menerus melakukan kekejaman, walaupun ia berkuasa, tetapi tidak akan dihormati dan dimuliakan rakyatnya.

Dengan demikian dalam pemikiran Machiavelli, rakyat juga memiliki peluang untuk menjadi penguasa, bahkan berperan besar untuk bisa ikut menentukan jalannya kekuasaan negara. Untuk menjamin hak-hak dan keadilan terhadap rakyat dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa (absolut), dibutuhkan “perjanjian” atau “kontrak” sebagai bentuk kesepakatan bersama semua unsur yang terdapat dalam negara. Kesepakatan tersebut selanjutnya melandasi dan menjadi konstitusi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan kesepakatan bersama itu sekaligus kekuasaan absolut penguasa terbatas, maka hak-hak rakyat untuk menikmati keadilan, persamaan, kedudukan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan bernegara akan terjamin. Konstitusi menjadi dasar hukum bagi seluruh unsur dalam negara agar kekuasaan negara tetap dapat lestari, persatuan dapat terjaga. Dalam hal ini Machiavelli meletakkan embrio sebagai konsep dasar tentang kekuasaan konstitusional.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan sebuah pokok masalah yakni: *Bagaimana konsep kekuasaan konstitusional menurut Niccolo Machiavelli?*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kekuasaan konstitusional menurut Niccolo Machiavelli,

D. Tinjauan Pustaka

Machiavelli adalah seorang pemikir (filsuf) besar yang karya-karyanya dibaca dan berpengaruh secara luas oleh berbagai kalangan dan menjadi bahan rujukan teoritis dan praktis sekaligus menginspirasi lahirnya gagasan dan tindakan baru.

Pemikiran politik Machiavelli dikenal melalui karyanya *Il Principe* dan *Discorsi*. Serbenarnya *Discorsi* ditulis sebelum *Il Principe*, sebelum sempat merampungkan *Discorsi*, Machiavelli mulai menulis *Il Principe*¹⁸ sekitar bulan Juli 1513. Setelah menyelesaikan *Il Principe*, dia melanjutkan kembali penulisan *Discorsi* yang selesai pada tahun 1519.¹⁹

¹⁸ *Il Principe* diterbitkan pertama kali di Italia pada tahun 1517. dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh C. Woekirsari, *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

¹⁹ J.H Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 402.

Discorsi merupakan komentar terhadap sepuluh buku pertama *Livy's History of Roma*.²⁰ Buku ini memuat gagasan politik Machiavelli secara lebih lengkap dibanding *Il Principe*. Dalam *Discorsi* dipaparkan bagaimana mendirikan suatu negara dan bagaimana mempertahankannya, dalam pembicaraan tersebut Machiavelli merujuk kepada contoh-contoh sejarah Romawi kuno. Tulisan-tulisannya merupakan hasil perenungan historis mengenai kekuasaan yang dituangkan dengan bahasa percakapan, antara penulis (Machiavelli) dan pembaca, bukan bahasa ilmiah-teoritik.

Konsep *kekuasaan konstitusional* Machiavelli diuraikannya dalam *Il Principe* (Sang Penguasa) khususnya pada bab IX. Namun pembahasannya tidak secara gamblang mengenai konsepsi kekuasaan konstitusional karena dituliskan dengan bahasa tutur (cerita) sehingga untuk memahaminya perlu penelaahan secara mendalam. Karya tersebut dianggap berbagai kalangan sebagai *master piece* Machiavelli. Namun, karena Machiavelli adalah sosok yang praksis dengan imajinasi yang dinamis, sehingga kedua karya besarnya itu memiliki keterkaitan yang erat. Dengan demikian, kekuasaan konstitusional Machiavelli secara implisit juga teruraikan dalam *Discorsi*. Sehingga dua karya itulah yang akan menjadi sumber primer penelitian ini.

Il Principe dianggap sebagai karya filsafat politik yang besar yang menimbulkan kontroversi. Tidak jauh berseberangan dengan tujuan penulisannya,²¹

²⁰ Niccolo Machiavelli *Diskursus Niccolo Machiavelli*, terj. Yudi Santoso dan Sovia VP (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 5.

²¹ *Il Principe* ditulis Machiavelli untuk dipersembahkan kepada penguasa Florence agar Machiavelli dapat kembali berkiprah dan memiliki jabatan politik tertentu dalam pemerintahan keluarga Medici. Buku ini akhirnya diberikan kepada pemimpin yang berkuasa pada saat buku ini selesai ditulis, Lorenzo De' Medici (1492-1519). Lihat J.H Rapar, *op. cit.*, hlm. 400. Juga Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*, terj. C. Woekirsari (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 1.

buku ini telah memberi inspirasi bagi banyak pemimpin. Sehingga tidak heran ada banyak penulis yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran Machiavelli yang terdapat dalam karya tersebut dan juga karya-karya lainnya. Mereka mengulas pemikiran-pemikirannya dan gagasan-gagasan politiknya. Ulasan-ulasan dan komentar-komentar tersebut menjadi sumber sekunder yang mendukung penelitian ini.

Pada tahun 1960, Henry J. Schmandt, seorang professor ilmu politik, menulis buku sejarah filsafat Politik yang berjudul *A History of Political Philosophy* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*.²²

Henry menggolongkan gagasan politik Machiavelli dalam filsafat politik era transisi. Buku ini membahas secara singkat mengenai psikologi Machiavelli dan pemikiran-pemikiran kontroversialnya seperti 'Tujuan Menghalalkan Segala Cara', moralitas, kebaikan umum dan kebajikan serta masalah watak negara dan nasib. Henry tidak membahas tentang kekuasaan konstitusional Machiavelli. Dia menyimpulkan bahwa filsafat politik (baca: kekuasaan) Machiavelli membuka pintu bagi kekuasaan negara yang tidak terbatas karena kerangka kerja teoritisnya menunjukkan perlunya kekuasaan absolut.²³

David E. Apter juga menjadikan Machiavelli sebagai tokoh utama filosof politik era transisi dalam bukunya *Pengantar Analisa Politik*. David mengindikasikan pemikiran Machiavelli sebagai kebangkitan sekularisme karena sebagai ahli politik dia tidak pernah menanyakan "Apakah ilmu politik yang benar itu?" tapi "kaidah

²² Terjemahan buku ini dalam Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2002. Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), hlm. iv.

²³ Henry J. Schmandt, *op. cit* hlm. 264.

apakah yang diperlukan untuk membimbing kita di sini dan saat ini?" sehingga kekuasaan menjadi terpisah dari kebajikan.²⁴ Dalam buku ini tidak ditemukan pembahasan mengenai kekuasaan konstitusional Machiavelli.

Pembahasan mengenai tokoh-tokoh filsafat politik, termasuk di dalamnya Machiavelli, juga ditulis oleh J.H Rapar dalam bukunya *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Dalam pembahasannya mengenai Machiavelli, Rapar menjelaskan seluk beluk kekuasaan, hubungan antara kekuasaan dan negara, hubungan antara penguasa dan kekuasaan serta sumber-sumber kekuasaan yang mengantarkan pada kesimpulan bahwa segala sesuatu harus bermuara pada kepentingan negara.²⁵ J.H. Rapar juga menyatakan kelirulah anggapan yang dikembangkan oleh beberapa sarjana yang menyatakan bahwa bagi Machiavelli kekuasaan adalah segala-galanya. Menurut Machiavelli kekuasaan hanyalah *alat* dan *dasar* bagi negara untuk menyelamatkan dan mempertahankan eksistensinya.²⁶ Dalam buku Rapar ini tidak ditemukan pembahasan mengenai hubungan antara konstitusi dan kekuasaan.

Paul Strathern dengan bukunya yang berjudul *90 Menit Bersama Machiavelli* berbicara mengenai kehidupan Machiavelli, mulai dari lahir sampai mati. Dia membeberkan secara rinci bagaimana kehidupan Machiavelli serta situasi dan kondisi sosial politik yang melingkupinya. Dalam mengungkap sejarah kehidupan Machiavelli ini, Paul juga menjelaskan gagasan-gagasan politik Machiavelli serta latar belakang munculnya gagasan-gagasan tersebut walaupun porsinya, tentu saja,

²⁴ David E Apter, *Pengantar Analisa Politik*, terj. Setiawan Abadi (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hlm. 76.

²⁵ J.H Rapar, *op. cit.*, hlm. 484.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 429.

tidak banyak. Penjelasan ini tidak lebih hanya untuk menjelaskan aksi dan reaksi dalam proses hidup yang dijalani sang tokoh, Machiavelli. Ini terlihat jelas dengan adanya bab yang diberi judul 'Kronologi Hidup dan Masa Machiavelli'.²⁷ Paul tidak menyinggung konsepsi kekuasaan konstitusional Machiavelli kecuali hanya penjelasan mengenai garis besar isi karya-karyanya terutama *Il Principe*.

Pesona pemikiran Machiavelli tidak hanya terpancar di luar negeri. Tidak sedikit penulis-penulis Indonesia yang tertarik dengan Machiavelli. ST. Sularto menulis buku *Penguasa Arsitek Masyarakat*. Buku ini, walaupun tipis dan tidak tebal, cukup komprehensif dalam membahas pemikiran kekuasaan Machiavelli beserta polemik yang ada di sekitarnya. Sularto menulis, menurut Machiavelli, untuk mengatur masyarakat yang korup, selain harus ada raja yang absolut dan despotis, juga diperlukan hukum yang menjadi pegangan sekaligus konstitusi moral dan kemasyarakatan. Dalam mengatur masyarakat ini raja harus memiliki tentara yang kuat dan rakyat yang terampil berperang.²⁸ Selain itu Sularto juga berbicara mengenai relevansi Machiavelli dengan menghubungkan antara Machiavellisme dengan paham kekuasaan Jawa.

Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan juga membahas pemikiran politik Machiavelli khususnya tentang kekuasaan. Ahmad Suhelmi, penulis buku ini, menyimpulkan bahwa Machiavelli memiliki obsesi terhadap negara kekuasaan (*maachtstaat*) di mana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan pada rakyat serta

²⁷ Paul Strathern, *90 Menit Bersama Machiavelli*, terj. Frans Kowa (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), hlm. 92-94.

²⁸ ST Sularto, *op.cit.*, hlm. 25-26.

prinsip-prinsip hukum.²⁹ Penjelasan-penjelasan Suhelmi terasa amat singkat dan terbatas pada hubungan antara kekuasaan dan penguasa tanpa ada penekanan terhadap undang-undang atau konstitusi.

Hampir semua karya tentang Machiavelli tidak pernah meninggalkan pembahasan mengenai riwayat hidup, situasi dan kondisi yang mempengaruhi gagasan-gagasannya serta karya monumentalnya, *Il Principe* dan *Discorsi*. Hal ini bisa dimaklumi karena pemikiran politik Machiavelli yang tertuang dalam kedua bukunya tersebut tidak seluruhnya bisa ditangkap oleh pembaca.³⁰ Machiavellianisme sebagai suatu gerakan politik merupakan bukti bahwa ajaran-ajaran Machiavelli menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Tidak heran jika ajaran-ajaran Machiavelli dianggap sebagai tuntunan dan nasehat bagi para tiran dan penguasa diktatorial.

Menurut hemat penulis, ini bisa jadi disebabkan karena dua karya Machiavelli di atas tidak pernah memberikan batas-batas yang kongkrit sehingga bisa dimaknai bermacam-macam. Ini juga yang menyebabkan pembahasan mengenai Machiavelli tidak lepas dari cerita tentang dia dan tentang kata-katanya dalam *Il Principe* dan *Discorsi*. Machiavelli memberi nama salah satu bab dalam *Il Principe* dengan "Kekuasaan Konstitusional", tapi pembahasannya terkesan sangat "tehnis" sehingga memerlukan interpretasi baru untuk menangkap maksud yang sesungguhnya.

Adapun kontroversi yang berkembang, lebih pada penafsiran tentang karya Machiavelli ini. M. Sastrapratedja dan Frans M. Parera dalam kata pengantarnya menyatakan, untuk menilai karya ini, penting untuk membedakan rekomendasi-

²⁹ Ahmad Suhelmi, *op. cit.*, hlm. 133.

³⁰ M. Sastraprateja dan Frans Parera, *op. cit.* hlm. ix.

rekomendasi politik yang Machiavelli ajukan dan konsepsi umum mengenai kehidupan politik. Perbedaan ini akan membantu kita dalam menjelaskan munculnya tafsiran yang berbeda dari maksud sebenarnya yang diinginkan Machiavelli.³¹

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian tentang bagaimana sebenarnya konsepsi kekuasaan konstitusional Machiavelli. Perhatian sebagian besar peneliti tersedot pada penelitian mengenai kekuasaan itu sendiri. Belum ada literatur dalam bentuk buku yang secara spesifik membahas tentang konsep kekuasaan konstitusional Machiavelli.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian literer (*library research*). Langkah penelitian ini terdiri dari dua tahapan, *pertama*, pengumpulan data, *kedua*, pengolahan data. Langkah pengumpulan data dilakukan dengan cara identifikasi data dari buku, artikel, kamus dan lain sebagainya yang dipandang ada relevansinya dengan tema penulisan.

Ada dua sumber yang dikaji dalam langkah pengumpulan data ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diambil dari karya Machiavelli sendiri yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini. Diantara sumber primer tersebut adalah *Il Principe* (Sang Penguasa) dan *Discorsi* (Percakapan). Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam skripsi ini, adalah tulisan orang lain tentang Machiavelli, khususnya tentang konsep kekuasaannya, seperti karya ST.Sularto, *Penguasa Arsitek Masyarakat* dan beberapa tulisan lain yang merupakan hasil kajian terhadap karya Machiavelli.

³¹*Ibid.*, hlm. xxxviii.

Penelitian ini menggunakan pendekatan “Historis-Filosofis”, sementara untuk pengolahan datanya digunakan beberapa metode, antara lain:³²

1. Deskriptif

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran Machiavelli khusus yang berhubungan dengan konsep kekuasaan konstitusionalnya. Dengan metode ini diusahakan terdeskripsi dan terurai secara rinci maksud konsepsi kekuasaan konstitusional Machiavelli.³³

2. Kesenambungan Historis

Pemikiran seorang tokoh sangat berkorelasi dengan perkembangan sosial-historis, sistem berfikir (intelektual) yang melingkupi dan mempengaruhi semasa hidupnya. Pemikiran yang dihasilkannya pun akan mempengaruhi para pemikir pada masa sesudahnya. Demikian halnya dengan pemikiran Machiavelli, sehingga perlu dicari korelasi pemikiran dan benang merah antara system pemikiran yang sejak awal telah berkembang dan melingkungi Machiavelli dan juga pengaruh hasil pemikiran Machiavelli terhadap para pemikir-pemikir sesudahnya sebagai satu kesinambungan historis.

3. Analisis

Setelah mendeskripsikan pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan konstitusionalnya dengan melihat berbagai pengaruh yang secara sosial-historis melatarbelakangi, kemudian konsep itu dianalisis untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan konsep tersebut dan ditarik pengertian baru atau

³² Anton Bakker dan A. Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61.

³³ *Ibid.*

kontekstualisasinya dengan situasi kontemporer—khususnya perpolitikan di Indonesia. Dengan demikian akan jelas maksud, kontribusi (manfaat), kelebihan dan kekurangan konsepsi kekuasaan konstitusional Machiavelli.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman isi dan esensi skripsi ini. Maka deskripsi skripsi ini akan disistematiskan penyajiannya berdasarkan kategorisasi pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, menyangkut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pandangan umum secara garis besar dari yang akan dijabarkan dalam bab-bab berikutnya yang merupakan keseluruhan isi skripsi.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan konstitusional. Dalam bab ini dijabarkan tentang: a) Kekuasaan, meliputi: pengertian kekuasaan, sumber kekuasaan dan jenis-jenis kekuasaan; b) Konstitusi, meliputi: pengertian konstitusi, latar belakang munculnya konstitusi dan fungsi konstitusi; c) Kekuasaan konstitusional, meliputi: konstitusionalisme, pengertian kekuasaan konstitusional, tujuan kekuasaan konstitusional.

Bab III menguraikan tentang biografi kehidupan Niccolo Machiavelli. Dalam bab ini dipaparkan tentang: situasi sosial politik masa Machiavelli, sumber inspirasi pemikiran politik Machiavelli dan kiprahnya dalam dunia politik serta karya-karyanya.

Bab IV merupakan penyajian tentang negara dan kekuasaan dalam pemikiran Machiavelli. Dalam bab ini dibahas tentang: a) Negara meliputi: bentuk-bentuk negara, negara sebagai sumber kekuasaan dan tujuan negara; b) Kekuasaan, meliputi: persoalan kekuasaan, cara memperoleh kekuasaan; kekuasaan konstitusional dan prinsip-prinsip kekuasaan konstitusional serta cara mempertahankan dan memperbesar kekuasaan; c) menarik dukungan rakyat bagi stabilitas kekuasaan politik; d) konstitusi, hukum dan militer; f) relevansi pemikiran Machiavelli dalam konteks politik Indonesia.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang perlu diperhatikan oleh para peneliti lain yang berminat terhadap konsep dan pemikiran Niccolo Machiavelli.



Problem yang timbul akibat lemahnya konsolidasi demokrasi adalah munculnya kekuatan militer dipangung politik, sosial dan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Akibat pihak sipil tidak mampu untuk mengendalikan semua unsur-unsur kehidupan masyarakat. Politisi sipil yang dengan relatif cepat dihadapkan kepada segala masalah seperti penyusunan suatu sistem politik yang sama sekali lepas dari kekuasaan asing, mengorganisir masyarakat yang relatif tergesa-gesa berhadapan dengan tuntutan modernisasi, masih mencoba model-model yang mungkin dipergunakan untuk melayani tuntutan-tuntutan masyarakatnya sendiri.⁵⁶

Di masa mendatang pengembangan demokratisasi di Indonesia masih akan menghadapi kendala. Masih adanya kesenjangan sosial dan kekerasan politik serta lemahnya penegakan supremasi hukum, mengindikasikan belum tertatanya kultur demokrasi di Indonesia. Tetapi pasca runtuhnya rezim sentralistik-otoritarian orde baru, angin perubahan warna politik Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Misalnya, diberlakukannya otonomi daerah (OTDA), pemilihan umum (PEMILU) langsung, pengurangan wakil militer di Parlemen dan penghapusan sebagian wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah secercah harapan untuk mengembangkan kultur demokrasi. Praktek-praktek kekuasaan masa silam di mana penguasa terus melanggengkan dan menyalahgunakan kekuasaannya akan dikikis dengan adanya keterlibatan rakyat untuk menentukan dan mengawasi jalannya kekuasaan secara aktif.

Di era ini, penguasa politik tidak bisa lagi berbuat semau-maunya. "Suara rakyat adalah suara Tuhan", tanpa bermaksud melebih-lebihkan makna kata tersebut,

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 49.,

bahwa sebenarnya kekuasaan tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan rakyat. Dengan kata lain, para pemimpin politik tidak bisa lagi mengumbar 'jargon-jargon suci' untuk menutupi kesalahan dan melanggengkan kekuasaannya secara mutlak. Saat ini mereka harus memperhatikan dan peka terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang. Untuk mendengar dan melaksanakan aspirasi dengan baik, para politisi harus membuat aturan main (regulasi) yang transparan dan adil. Hal ini diharapkan akan mendorong proses demokratisasi. Dalam artian, keterlibatan rakyat dalam setiap proses politik bukan sebatas penonton atau penggembira. Tetapi sebagai subyek yang harus dihargai dan didengar.

Disamping itu, dalam sebuah sistem pemerintahan republik, rakyat memperoleh ruang gerak yang cukup memadai untuk bersuara. Maka penguasa harus mampu mengelola persaingan antar golongan dan antar orang. Pernyataan ini pantas menjadi renungan para pemimpin politik di Indonesia, baik yang berada dalam infrastruktur (politisi dan parpol), juga yang berada dalam suprastruktur (seperti Departemen Dalam Negeri). Yang harus dimungkinkan adalah menciptakan suatu mekanisme sehingga suara masyarakat terserap dan menetralsisir berbagai persaingan dan konflik politik.

Dalam era reformasi sekarang yang diperlukan adalah peran kepemimpinan yang disebut oleh Machiavelli sebagai *the law giver* untuk menjamin persatuan dan kesatuan. Dia seorang pemimpin, katakan seorang presiden yang tidak lagi berkuasa secara absolut, tetapi penguasa yang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat untuknya dan yang memiliki hati terhadap kepentingan rakyat.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 101.

bersama berupa “kontrak” antar golongan masyarakat yang tercermin dalam konstitusi (perundangan). Pemberlakuan perundangan ini efektif jika didukung oleh *alat* negara yakni angkatan bersenjata (militer) yang berdisiplin. Angkatan bersenjata merupakan keniscayaan dalam suatu negara sebab tanpa angkatan bersenjata yang kuat, tidak akan menjamin sistem hukum yang efektif. Dalam perjalanan sejarah, pemikiran-pemikiran Machiavelli tersebut terus dikembangkan sehingga semakin berkembang (melahirkan pengertian baru) dan menjadi dasar atau mendasari pemikiran-pemikiran kekuasaan konstitusional modern.

B. Saran-saran

Bagi para peneliti yang berminat terhadap pemikiran-pemikiran filsafat politik Machiavelli, penulis menyarankan agar komprehensif dalam membandingkan pemikiran Machiavelli dalam karya-karyanya. Karena filsafat politik Machiavelli bertolak dari desakan dan tuntutan situasi *chaotis* sehingga dapat menimbulkan kesalahan fatal dalam menafsirkannya. Disamping itu pemikiran Machiavelli cukup kontroversial sekaligus kental dengan kepentingan pribadinya dan juga kekisruhan politik yang melingkungi di masa hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Bakker, Anton dan A. Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1976.
- Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Budiman, Arif. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Dangun, Save M, *Filsafat Eksistensialisme.*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- E. Apter, David. *Pengantar Analisa Politik.*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- J. Schmandt, Henry. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Machiavelli, Niccolo. *Il Principe*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- _____, *Diskursus*. terj. Yudi Santoso dan Sovia VP Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003.
- Mayer, Frederick, *A History of Modern Philosophy*. New York: American Book Company, 1951.
- Malian, Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 45*. Yogyakarta: UII Pers, 2001.
- Mudhofir, Ali, *Kamus Filsuf Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Deliar, Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan, 1998.
- O. S. Hiariej, Eddy. *Konstitusionalisme*. Makalah 2000.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- Benedetto, Pax, *Politik Kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli*. Jakarta: Gramedia, 2003.

- Rappaport, J.H, *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- _____, *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- _____, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Roswanto, Alim, "Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat dan Pembacaannya dalam Realitas Politik Indonesia", dalam *Jurnal Refleksi*, Vol. 1, No. 1 Juli 2001.
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1980.
- Schmid, J.J. Von, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. terj. R. Wiranto, dkk. Jakarta: Pembangunan, 1980.
- Strathern, Paul, *90 Menit Bersama Machiavelli*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Suhelmy, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Sularto, ST, *Penguasa Arsitek Masyarakat*., Jakarta: Gramedia, 2003.
- Smith, Linda dan William Raeper, *Ide-ide Filsafat Agama Dulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Thaib, Dahlan. *Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Wheare, K.C., *Modern Constitutions*., terj. Muhammad Hardani, Konstitusi-Konstitusi Modern Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Windhu, I. Warsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

TENTANG PENULIS

Nama : Ahmad Rifa'i
Tnp/Tgl Lahir : Indramayu, 26 Februari 1979
Alamat Asal : Kliwed 07/02, Kertasemaya, Indramayu 45272
Alamat di Jogja : Jl. HOS Cokroaminoto Gg. Ngadimulyo Sodagaran
TR. III/890-B Yogyakarta (0274) 619730
Pendidikan : MI Tarbiyatul Islamiyah Indramayu lulus tahun 1991
MTs Ali Maksum Krapyak Jogja lulus tahun 1994
MA Ali Maksum Krapyak Jogja lulus tahun 1998
IAIN Sunan Kalijaga Jogja lulus tahun 2004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA